

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemberlakuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakibatkan urusan pemerintahan atas asas otonomi yang menjadikan pergeseran sistem pemerintahan yang semula berwujud sentralisasi menjadi desentralisasi. Demi menentukan arah, kebijakan, tujuan, program, hingga pengelolaan dan pengalokasian dana dalam urusan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah diberi wewenang dan tanggung jawab pada era otonomi daerah tersebut. Sehingga, pelaksanaan pemerintahan daerah ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan daerah yang merata serta memajukan kesejahteraan masyarakat melalui peran aktif masyarakat itu sendiri, progresifitas pelayanan dan pemberdayaan, serta menumbuhkan daya kompetisi daerah dengan tidak meninggalkan prinsip kearifan lokal, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan demokrasi.

Dalam sudut pandang sebagai masyarakat, kinerja pemerintah selalu menjadi sorotan hal yang penting dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan suatu program kerja yang dilakukan

oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 menyatakan bahwa definisi kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kapasitas dan kualitas yang terukur. Selain itu, kinerja suatu organisasi dapat dilihat dari tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya sejauh mana dapat tercapai. Maka dari itu pemerintah dituntut harus memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat karena pemerintah daerah itu sendiri termasuk sebagai organisasi sektor publik yang kewajibannya adalah menyediakan berbagai pelayanan kepada masyarakat. Dikarenakan semakin tingginya tuntutan tersebut maka pemerintah harus memiliki pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

Apabila dilihat dari permasalahan yang dihadapi serta dialami negara Indonesia pada saat ini, berbanding terbalik dengan kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Banyaknya kejadian oknum-oknum pemerintah daerah yang sudah melanggar aturan hukum dikarenakan menyalahgunakan wewenang dan lepas dari tanggung jawab yang sudah ada, sehingga akan berdampak bagi kinerja pemerintah itu sendiri. Salah satunya korupsi yang masih merajalela dikalangan pejabat Negara, termasuk yang berada di pemerintah daerah sekalipun banyak yang terjerat kasus tersebut. Korupsi dalam pandangan hukum islam disebut risywah atau suap yang berarti

perbuatan tercela dan Allah sendiri juga melaknatnya karena merupakan dosa besar. Ulama fikih juga mengatakan bahwa tindakan korupsi merupakan perolehan harta dengan cara terlarang yang hukumnya adalah haram, yang apabila dilihat dari prinsip perolehan harta tersebut bukan menjadi milik yang sah namun milik orang lain yang diperoleh dengan cara terlarang, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

”Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”(QS. Al-Baqarah: 188).

Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja pemerintahan demi mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah dengan menerapkan sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sudah tertuang didalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Dengan menerapkan unsur-unsur dan sub unsur-unsur SPIP di

lingkungan pemerintah yaitu penilaian resiko, informasi dan komunikasi, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, dan pemantauan sistem pengendalian intern, sehingga tujuan SPIP pada pemerintahan akan tercapai.

Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah serta keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya prosedur dan pelaksanaan kegiatan yang jelas akan menimbulkan sistem pengendalian intern yang baik. Selain itu juga ditinjau dari pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien (Zodia, 2015).

Demi mewujudkan pemerintahan yang baik maka pemerintah tersebut harus terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau dikenal dengan istilah *good governance*. Menurut Mardiasmo (2009) *Good governance* merupakan suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola tindak dan pola sikap pelakunya dilandasi karakteristik dan prinsip-prinsip tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 menyatakan definisi *good governance* merupakan proses pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, efektifitas dan efisiensi, serta dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan terselenggaranya *good governance* dapat mewujudkan aspirasi masyarakat

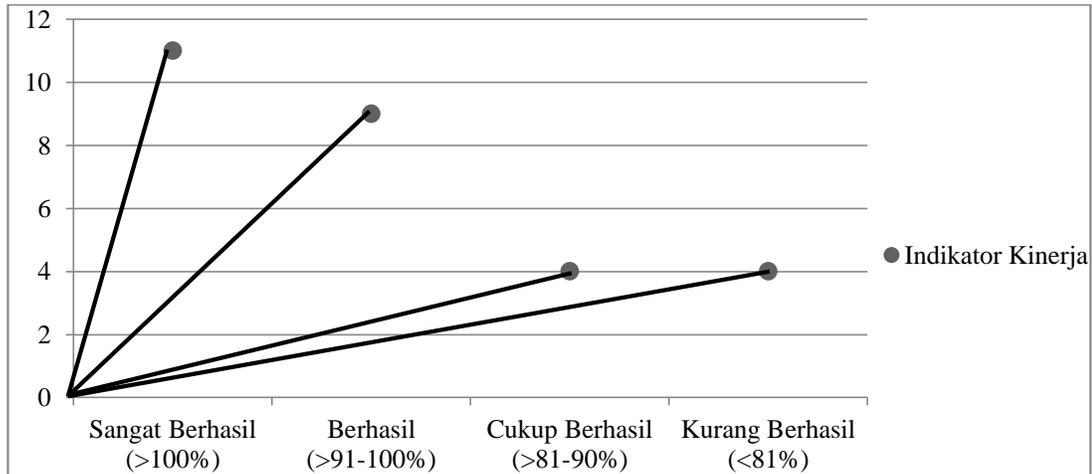
dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Hal ini dapat menimbulkan kinerja suatu organisasi atau pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan organisasi pula.

Teknologi informasi juga faktor lain yang memiliki peranan penting terhadap tingkat kinerja pada instansi pemerintahan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengatur adanya kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien, demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan. Kinerja suatu organisasi maupun kinerja individu akan meningkat apabila dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan sesuai, serta sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dan dapat mengoperasikannya (Thompson, 1994). Sehingga dengan pemanfaatan teknologi informasi ini pemerintah dapat menunjukkan sebuah informasi yang berkenaan dengan pemerintahan yang bisa diakses oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemerintah terhadap masyarakat.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini terungkapnya kasus yang menimpa bupati Kotawaringin Timur, Bapak Supian Hadi, yang tersandung kasus korupsi penyalahgunaan wewenang dalam

penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada tiga perusahaan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Diduga pemberian surat izin usaha pertambangan tidak sesuai dengan persyaratan dan melanggar regulasi. Dalam perbuatannya tersebut bupati Supian Hadi menyebabkan kerugian Negara sebesar Rp5,8 triliun dan US\$711 ribu, serta berdampak pada kerusakan lingkungan dan hutan.

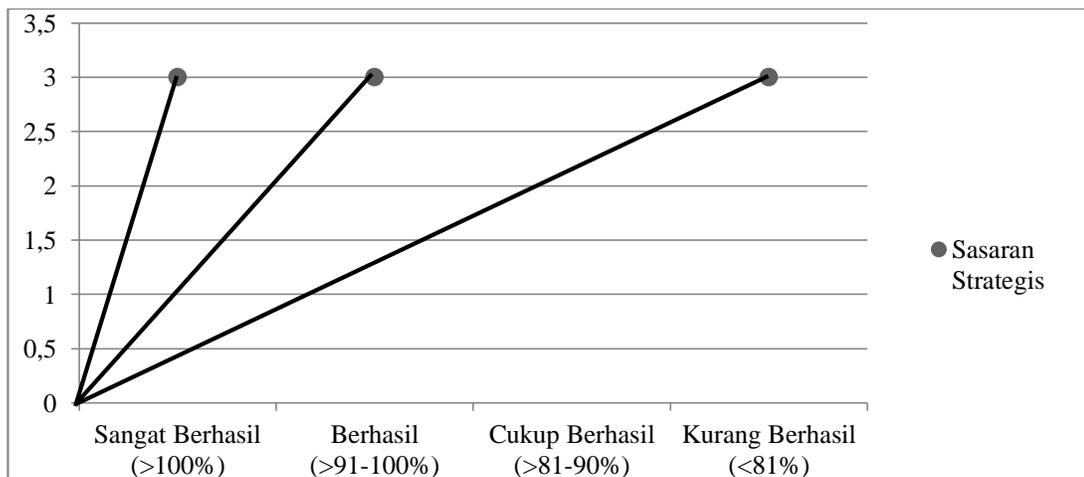
Hasil Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2013. Opini tersebut mengindikasikan bahwa adanya perbaikan item laporan keuangan tertentu yang menjadi pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Namun, pada tahun 2014-2018 BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKDP) Kabupaten Kotawaringin Timur. Opini tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berupaya untuk melakukan perbaikan sehingga menghasilkan opini yang menyatakan bahwa LKDP Kabupaten Kotawaringin Timur bebas dari salah saji material, posisi keuangan, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Sumber: <https://kotimkab.go.id/> (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2016), data diolah kembali oleh peneliti.

Gambar 1.1

Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016



Sumber: <https://kotimkab.go.id/> (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2016), data diolah kembali oleh peneliti.

Gambar 1.2

Capaian Sasaran Strategis Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016, berdasarkan grafik diatas, yang menunjukkan bahwa:

1. Capaian indikator kinerja utama yang masuk kategori atau predikat sangat berhasil (rentang capaian/persentase lebih dari 100%) ada 11 indikator. Capaian indikator kinerja utama yang masuk predikat berhasil ada 9 indikator. Capaian indikator kinerja utama yang masuk predikat cukup berhasil ada 4 indikator dan capaian indikator kinerja utama yang masuk predikat kurang berhasil ada 4 indikator.
2. Ada 3 sasaran strategis yang tercapai masuk ke kategori atau predikat sangat berhasil (rentang capaian/persentase lebih dari 100%) antara lain:
 - a. Meningkatnya indeks pembangunan manusia.
 - b. Meningkatnya sarana dan prasarana publik dengan melibatkan peran swasta untuk pertumbuhan ekonomi, mendorong peluang investasi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan tersedianya lapangan kerja.
 - c. Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan darat.
3. Ada 3 sasaran strategis yang tercapai masuk ke kategori atau predikat berhasil (rentang capaian/persentase lebih dari 91% hingga 100%) antara lain:
 - a. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan formal dan non formal.

- b. Meningkatnya ekonomi rakyat melalui percepatan perubahan struktur ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui usaha kecil dan menengah, peningkatan peran kelembagaan koperasi dan peningkatan daya saing produk.
 - c. Meningkatnya perbaikan mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam di perkotaan dan pedesaan, peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penahanan laju kerusakan lingkungan dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
4. Tidak ditemukan sasaran strategis yang masuk ke kategori atau predikat cukup berhasil (rentang capaian/persentase lebih dari 81% hingga 90%).
5. Ada 3 sasaran strategis yang masuk ke kategori atau predikat kurang berhasil (rentang capaian/persentase kurang dari 81%) antara lain:
- a. Meningkatnya ekonomi makro.
 - b. Meningkatnya penataan objek wisata daerah dan penggalan budaya daerah.
 - c. Meningkatnya reboisasi, penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan serta meningkatnya penghutanan kembali (reforestasi) dan program pengurangan emisi karbon,.

Secara komprehensif, ternyata masih ada sasaran dan indikator kinerja yang kurang berhasil atau belum tercapai secara sempurna. Namun, setelah di analisis keseluruhan rata-rata capaian kinerja Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa mendapat predikat sangat berhasil atau melampaui target.

Berdasarkan fenomena pemerintah daerah saat ini dan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, *Good Government Governance*, dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah)”.

Kontribusi dari penelitian ini mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal, *good government governance*, dan teknologi informasi dalam lingkup pemerintahan dengan melakukan survey di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur dan menggunakan dasar Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku sebagai tindak lanjut atas penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, khususnya untuk *good government governance* menggunakan prinsip yang berdasarkan *United Nations Development Programme* (UNDP). Penelitian sebelumnya tentang pengendalian internal dan *good governance* pernah dilakukan dengan fokus pada kinerja pegawai di bidang keuangan

(Pangestika, 2016). Penelitian sebelumnya tentang teknologi informasi yang hanya berfokus terhadap kualitas laporan keuangan (Soimah, 2014). Penelitian ini dapat menjadi pendukung dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel independen yaitu teknologi informasi, untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

B. Batasan Masalah

Permasalahan inti dari penelitian ini adalah Kinerja Pemerintah Daerah. Di samping permasalahan yang sudah dijelaskan terkait Sistem Pengendalian Internal belum berjalan optimal, prinsip-prinsip *Good Government Governance* belum diterapkan dengan baik, dan pemanfaatan Teknologi Informasi yang masih kurang efektif dan efisien, masih banyak permasalahan lain yang muncul berhubungan dengan Kinerja Pemerintah Daerah. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Ukuran Legislatif, dan sebagainya.

Oleh karena itu, mengingat ruang lingkup permasalahan yang luas, peneliti hanya akan membahas mengenai Sistem Pengendalian Internal, *Good Government Governance*, dan Teknologi Informasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar hasil penelitian ini dapat terfokus pada permasalahan dan terhindar dari penafsiran hasil yang tidak diinginkan. Selain itu, alasan pembatasan masalah ini karena hubungan antara Sistem Pengendalian Internal, *Good Government Governance*, dan Teknologi Informasi memberikan pengaruh dan informasi yang bermanfaat tentang Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kotawaringin Timur yang berjumlah 30 dinas maupun badan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Apakah *good government governance* berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur?
3. Apakah teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang sistem pengendalian intern terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang *good government governance* terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris tentang teknologi informasi terhadap kinerja SKPD Kabupaten Kotawaringin Timur.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa mengenai akuntansi sektor publik khususnya yang berkaitan dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah berdasarkan sistem pengendalian intern, tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi (*Good Governance*), serta penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip *value for money*.

b. Menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai literatur akuntansi di sektor publik khususnya pada pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengukuran kinerja berdasarkan sistem pengendalian intern, tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi (*Good Governance*), serta penggunaan teknologi informasi yang efektif dan efisien dengan mengedepankan prinsip *value for money*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengukur sejauh mana kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari sistem, tata kelola, dan teknologi yang memadai dengan prinsip *value for money* di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencapai pemerintahan yang baik.

b. Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan atau tolak ukur untuk para investor yang ingin menanamkan saham-nya kepada pemerintah dengan melihat kinerja dari pemerintah tersebut melalui sistem pengendalian yang baik, terbebas dari praktik korupsi, serta teknologi yang memadai berdasarkan prinsip *value for money*.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi serta menjadi bahan acuan untuk menambah pengetahuan tentang pemerintah daerah yang baik dengan dilihat dari penggunaan sistem pengendalian yang baik, tata kelola pemerintahan yang terbebas dari korupsi, serta penggunaan teknologi yang efektif dan efisien.